

**MONEV RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Tri Wulan I		Tri Wulan II		Tri Wulan III		Tri Wulan IV		Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Rekomendasi	Upaya yang telah dilakukan	Penanggung jawab
						Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>Misi 3 : Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan Yang Baik dan Inovatif</b>																		
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah		Persentase Capaian Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan Barang Milik Daerah	99,68	%	42,65%	42,65%	64,81	64,95	74	75,11	99,68	101,14	Komitmen pimpinan dan perangkat daerah dalam mewujudkan tata kelola yang akuntabel, ketersediaan regulasi dan pedoman teknis, pemanfaatan sistem informasi pengelolaan keuangan dan BMD, serta pelaksanaan pembinaan dan koordinasi lintas perangkat daerah secara berkelanjutan	Keterbatasan kompetensi dan pemerataan SDM pengelola keuangan dan BMD, belum optimalnya ketepatan waktu dan kualitas penyampaian data oleh perangkat daerah, dinamika penyesuaian kebijakan dan aplikasi, serta perlunya penguatan penatausahaan dan pemutakhiran data BMD guna mendukung kualitas laporan keuangan yang andal dan akuntabel.		Peningkatan kompetensi SDM pengelola keuangan dan BMD, penguatan koordinasi dan kepatuhan perangkat daerah dalam penyampaian data, penyesuaian kebijakan dan aplikasi, serta penerbitan dan pemutakhiran data BMD secara berkala guna mendukung laporan keuangan yang andal dan akuntabel.	Kepala BPKAD
2		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	100	%	62,33%	62,33%	77,18	77,18	95,28	95,28	100	100	Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas P2DD (percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah)	-	Memperkuat penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah sebagai bagian dari implementasi Elektrifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) melalui penguatan regulasi dan SOP internal, peningkatan kompetensi SDM pengelola keuangan dan pengguna kartu kredit pemerintah, serta perluasan ekosistem merchant non-tunai di wilayah Kota Magelang	Mempercepat implementasi ETPD (Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah) melalui penggunaan KKI (Kartu Kredit Indonesia) dalam ekosistem digital belanja pemerintah daerah.	Kepala BPKAD
3		Meningkatnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Capaian Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	99,64	%	22,97%	22,97%	52,44	52,72	52,72	52,72	99,64	102,27	Terdapat ketentuan terkait penatausahaan Belanja Modal pada Peraturan Wali Kota No. 41 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2021 dengan tujuan lebih menertibkan lagi terhadap pencatatan aset/barang milik daerah.	Belum optimalnya pemahaman pengurus barang terhadap ketentuan pengelolaan BMD sehingga membuat proses penyusunan laporan barang / penatausahaan barang kurang optimal	Mengoptimalkan implementasi Peraturan Wali Kota Nomor 41 Tahun 2024 melalui sosialisasi, pembinaan, serta monitoring kepatuhan perangkat daerah agar penatausahaan belanja modal selaras dengan pencatatan Barang Milik Daerah secara terbit dan akuntabel.	Melakukan pembinaan rutin terhadap pejabat penatausahaan barang, pengurus barang, dan pengurus barang pembantu	Kepala BPKAD
4	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah		Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	50,44	%	56,28%	56,28%	52,68	52,68	61,18	61,18	50,44	61,27	Pertumbuhan aktivitas ekonomi daerah dan iklim investasi yang kondusif	Belum optimalnya penggalan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1) Menyusun Kajian Potensi Pajak Daerah (PBJT, Pajak Air Tanah dan Pajak Reklame) 2) Menyusun Perubahan regulasi terkait pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, yaitu dengan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kepala BPKAD

5		Meningkatnya Pendapatan daerah	Rasio PAD terhadap pendapatan daerah	34,05	%	36,88%	36,88%	39,13	39,13	36,29	36,29	34,05	36,61	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya yang bersumber dari Pajak Daerah	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak masih rendah	Melaksanakan edukasi dan sosialisasi pajak daerah secara terencana dan berkelanjutan kepada masyarakat dan wajib pajak di tiga kecamatan melalui kegiatan tatap muk	Meningkatkan Edukasi dan Sosialisasi Pajak Daerah kepada masyarakat dan wajib pajak daerah di 3 Kecamatan	Kepala BPKAD
---	--	--------------------------------	--------------------------------------	-------	---	--------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--	---	---	--------------



Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah  
Kota Magelang

NANANG KRISTIYONO, S.STP, M.Si